

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bencana alam dapat terjadi setiap saat, terlebih di Indonesia dimana yang wilayahnya berada pada daerah Cincin Api Pasifik (*Ring of fire*). Berdasarkan penjelasan *website* resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berdasarkan geografisnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang berada pada empat lempeng tektonik (lempeng Benua Asia, Australia, Samudera Hindia, dan pasifik). Dengan letak wilayah seperti ini menyebabkan wilayah Indonesia lebih rentan terkena bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Seperti yang dituliskan oleh Syafitri bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia yaitu Lempeng Eurasia, IndoAustralia dan Pasifik yang tetap bergerak satu sama lainnya yang menyebabkan Indonesia sebagai daerah tektonik aktif dengan tingkat seismisitas atau kegempaan yang tinggi (Syafitri, 2019). Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus bencana yang terjadi di Indonesia salah satunya yang terjadi di Pulau Lombok.

Pada Tahun 2018 gempa Bumi dengan kekuatan sebesar 7 SR, ini merupakan gempa utama dari gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok. Dengan terjadinya rangkaian gempa tersebut, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2018) mengakibatkan:

Tabel 1.1 Dampak Gempa Lombok

No.	Sektor kerugian	kerugian
1	Sektor pemukiman	Rp. 6,02 trilyun
2	Sektor infrastruktur	Rp. 9,1 milyar
3	Sektor ekonomi produktif	Rp. 570,66 milyar
4	Sektor sosial	Rp. 779,82 milyar
No.	Kerusakan	Jumlah
1	Rumah	71.962
	Fasilitas Pendidikan	
1	PAUD	123
2	SD	341
3	SMP	95
4	SMA&SMK	100
5	SLB	6
	Fasilitas Kesehatan	

1	Rumah sakit	1
2	Puskesmas	11
3	Pustu (puskesmas pembantu)	36
4	Polindes	4
5	Gedung Farmasi 1	1
Fasilitas peribadahan		
1	Masjid	115
2	Pura	10
3	Pelinggih	3

(Sumber : BNPB 2018)

Dari beberapa wilayah di Pulau Lombok yang terdampak gempa, Lombok Utara merupakan wilayah yang paling terdampak karena paling berdekatan dengan pusat gempa. Kepala Pusat Data, informasi dan Hubungan masyarakat BNPB Sutopo mengatakan bahwa kerusakan pemukiman di Lombok Utara hampir 75 persen akibat gempa (Antara, 2018). Sebagai salah satu provinsi yang sering menghadapi bencana alam ada sejumlah potensi bencana alam yang bisa terjadi di Pulau Lombok, dengan itu maka mitigasi gempa bumi, seperti yang ada di Lombok, harus sangat diperhatikan, dan pemerintah harus menyebarkan kesadaran akan kerentanan pulau itu terhadap bencana alam (Susilawati, 2019). Dengan kondisi seperti itu Masyarakat seharusnya memiliki kesadaran tentang pengetahuan bencana gempa bumi termasuk kerawanan wilayah tempat tinggal, pemahaman tentang sebab dan akibat adanya kemungkinan gempa (Pristanto, 2010).

Melihat penjabaran di atas, masyarakat tidak bisa berdiri sendiri, diperlukan juga campur tangan pemerintah sebagaimana fungsi utama pemerintah adalah pelayanan, melayani kebutuhan masyarakat dalam segala sektor merupakan fungsi pemerintah yang dilakukan oleh seluruh negara di dunia termasuk dalam penanggulangan bencana (Ramadhan & Matodang, 2016). Campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan pemulihan hal ini didukung oleh peraturan pemerintah nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana karena pemerintah memiliki wewenang dari saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana (Kusuma & Nurmandi, 2020). Kemudian Wignyo Adiyoso juga mengatakan bahwa pada kegiatan pemulihan pasca bencana di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang terdampak,

pemerintah pusat, masyarakat, dan dunia usaha, hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Adiyoso W. , 2018). Menimbang hal tersebut pemerintah telah menetapkan dalam Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana. Dalam penanganannya bencana sendiri harus dengan strategi yang tepat, tidak hanya bertindak pasca bencana namun melakukan persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana (Noor, 2014). Melihat hal tersebut maka diperlukannya manajemen dalam mengatasi bencana, Menurut Ayu Ningsih terdapat tiga tahapan dalam menejemen bencana, yang pertama yaitu Manajemen resiko bencana, lalu kedua manajemen kedaruratan, dan yang ketiga adalah manajemen pemulihan atau Recovery. (NINGSIH, 2022).

Dari ketiga tahap Manajemen di atas penelitian ini berfokus pada pemulihan, karena proses pemulihan di Pulau Lombok masih berlangsung dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Pada tahun 2022 BPBD Provinsi NTB dimana United Nations Development Programe (UNDP) Indonesia dengan dukungan pendanaan dari pemerintah German melaksanakan proyek Pertra (Lombok/Sulawesi Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstructive Assistance) demi mendorong percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah Gempa Bumi 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPBD, 2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Nurmandi pada tahun 2020 dikatakan bahwa pemulihan di Pulau Lombok berjalan dengan cukup baik namun masih ada beberapa hambatan yang terjadi dimana adanya keterlambatan dalam pembangunan Rumah Tahan Gempa dimana masih banyaknya masyarakat yang belum menerima bantuan yang disebabkan oleh masih adanya fasilitator yang bermasalah di lapangan (Kusuma & Nurmandi, 2020). Dalam kasus di Pulau Lombok Proses pemulihan bencana perlu waktu dalam pelaksanaannya, kelambatan prosesnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, kerjasama antar masyarakat yang kurang dan kurangnya budaya sadar bencana(Farizi, Syarifuddin, Atri, 2020).

Dalam manajemen pemulihan sendiri terdapat beberapa hal-hal penting yang telah ditetapkan sebagai landasan kegiatan pemulihan. Wignyo Adiyoso, menjelaskan beberapa aspek penting dalam dilaksanakannya rehabilitasi dan

rekonstruksi adalah aspek kemanusiaan, permukiman, ifrastruktur pembangunan, ekonomi, sosial, dan aspek lintas sektor (Adiyoso W. , 2018).

Melihat dari penjelasan di atas maka menarik sekali untuk membahas tentang peran pemerintah dalam pemulihan, dikarenakan pemulihan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah lalu pemulihan sendiri tidak berlangsung dalam jangka waktu yang pendek namun Panjang dan berkelanjutan dimana jikalau pemulihan berjalan dengan baik maka akan membantu proses mitigasi bencana selanjutnya. Lalu mengapa Pulau Lombok? karena pada saat terjadinya gempa pemulihan di pulau Lombok berjalan dengan cukup baik namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

## **1.2. Rumusan masalah.**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana pemerintah dalam pemulihan pasca gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara.

## **1.3. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan recovery atau pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara yang masih berlangsung hingga saat ini.

## **1.4. Manfaat penelitian**

### **1.4.1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana seharusnya peran pemerintah saat masa pemulihan atau recovery dari bencana alam dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk masyarakat maupun pemertintah dalam penelitian selanjutnya.

### **1.4.2. Manfaat praktis**

Bagi masyarakat dan pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khusus kepada masyarakat terhadap bagaimana seharusnya peran pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam masa pemulihan atau recovery saat terjadinya bencana alam

## **1.5. Tinjauan Pustaka**

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun telah mengkaji beberapa penelitian baik jurnal maupun buku didasarkan pada topik – topik yang relevan demi memberikan kejelasan terhadap penyusun agar memberikan batasan dan berfokus pada hal yang akan diteliti. Selain itu, pada bagian ini mengkaji topik – topik yang relevan untuk memastikan keaslian skripsi terkait “Peran Pemerintah Dalam Pemulihan Gempa Bumi yang Terjadi di Kabupaten Lombok Utara” merupakan hal yang cukup menarik untuk di angkat.

Tabel 1.2 Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Wingnyo Adiyoso (2018)	Manajemen Bencana, pengantar dan isu-isu strategis	Masyarakat perlu dipersiapkan agar mampu mengantisipasi dan merespon setiap kejadian bencana dan bagaimana pentingnya peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam rangka manajemen bencana. Meskipun seluruh pihak bertanggung jawab dan berperan penting, pemerintah diharapkan tetap menjadi pemimpin dalam manajemen bencana, dimana pemerintah sebagai pemimpin yang memiliki power, sumber daya, dan sumber dana.
2	Brenda D Phlillips (2009)	Disaster Recovery	Pemulihan bencana sering tidak terencana saat terjadinya hal darurat dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat pemulihan bencana diperlukan kontribusi dari segala pihak tidak hanya pemerintah namun pemerintah sebagai penanggung jawab utama. Program masyarakat maupun swasta dalam pemulihan perlu sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi menciptakan kebijakan yang tepat.
3	Renny Febrin (2016)	Peran Pemerintah Kabupaten Karo Dalam Penanggulangan Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Sumatera Utara Tahun 2013 – 2015	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo menjadi barisan terdepan dalam pengkoordinasian proses kegiatan evakuasi masyarakat yang wilayahnya terdampak. Adapula faktor penghambat dan pendorong berjalannya peran pemerintah dalam mengatasi dampak dari bencana alam.
4	Sri Heryanti (2020)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.	Pemerintah menunjukkan perannya dalam penanggulangan bencana melalui lima aspek, yaitu aspek kelembagaan, pendanaan, legalisasi, perencanaan, dan pengembangan kapasitas. Dalam hal ini langkah strategis melalui BNPB dan BPBD diambil pemerintah guna mengatasi dampak dan resiko bencana alam. Dalam pelaksanaannya hampir di semua daerah

			memiliki hambatan yang sama dalam kegiatan penanggulangan, yaitu keterbatasan SDM, anggaran, sarana-prasarana, dan lemahnya koordinasi antar sektor
5	<i>Heru Kusuma Bakti, Achmad Nurmandi (2020)</i>	Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi Di Lombok Utara Pada Tahun 2018.	Pemerintah lombok utara dalam melakukan pemulihan pasca bencana berfokus melalui 5 Sektor diantaranya Sektor Pemukiman, Ekonomi, Infrastruktur, Sosial dan Lintas Sektor. Pemulihan pasca gempa lombok juga telah melibatkan berbagai lembaga kepentingan yang terkait seperti kementerian dan Lembaga lain serta pihak non pemerintah atau swasta. Meskipun pemulihan berjalan dengan baik sampai pada saat ini tetapi ada sejumlah permasalahan yang harus di jadikan bahan evaluasi pemerintah daerah seperti keterlambatan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) bagi masyarakat yang sampai pada saat ini juga masih banyak yang belum menerima bantuan serta masih adanya fasilitator yang bermasalah di lapangan sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan, ini dilihat dari jumlah rumah yang dibangun masih jauh dari yang diharapkan.
6	<i>Virda Reski Awalia, 2015</i>	Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Kaloka Utara	<i>Secara alami, pemerintah daerah dan masyarakat setempat harus mengantisipasi tragedi apa pun untuk mencegah kerugian material. Karena masyarakat memiliki peran krusial dalam menghadapi bencana yang akan terjadi selain pemerintah, guna menumbuhkan rasa aman meski kawasan tersebut tergolong berisiko bencana. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan bencana di Desa Tahibua dapat dinilai sangat baik karena didasarkan pada laporan penduduk setempat yang percaya bahwa kebijakan pemerintah dan persiapan yang sangat matang dilakukan baik sebelum maupun sesudah bencana melanda.</i>
7	<i>Jessica Intansari Wilade, Sofie Pangemanan, dan Ismail Sumampow, 2019</i>	Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetan di Kabupaten Kepulauan Silau Tagulandang Biaro	Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah melakukan pekerjaan yang fantastis dalam mengelola bencana alam gunung berapi Karangetang. Pemerintah daerah tetap dapat melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk penanggulangan bencana meskipun masih terdapat tantangan dalam proses pelaksanaannya. Mengingat bencana alam Gunung Api Karangetang bisa terjadi sewaktu-waktu, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan pelayanan di daerah ini.

8	Amndi Zarkasyi Rahman, 2017	Kapasitas Daerah Banjarnegara Dalam Penanggulangan Bencana Alam Tanah Long	skor kapasitas penanggulangan bencana di daerah mencapai 70,46% dari 88 indikator sehingga masuk dalam kategori B. Artinya kapasitas Kabupaten Banjarnegara dalam penanggulangan bencana sudah dapat dikatakan baik. Dari hasil tersebut yang menjadi perhatian utama adalah faktor risiko dasar yang mengurangi upaya melalui pembentukan "Desa Tangguh Bencana".
9	Ihdaa Zulqa, Ratna Herawati, Untung Sri Hardjanto, 2017	Pelaksanaan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Berdasarkan kondisi geografis Kota Semarang yang rawan bencana alam maka, pemerintah daerah membentuk BPBD Kota Semarang. Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Pembentukan BPBD ini sesuai dengan amanat yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang pelaksanaannya pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
10	Aditya Ramadhan, Muhammad Ferdiansyah, dan Lenny Meilany, 2017	Peran Local Leader Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Jatinaror	Keputusan pertama yang dibuat oleh para pemimpin lokal dalam manajemen bencana mengarah pada pembentukan JERCY (Komunitas Tanggap Darurat Jatinaror), pelatihan, dan pengerukan sungai Cikeruh. berinteraksi dengan organisasi non-pemerintah dan pemerintah dalam kaitannya dengan bantuan bencana banjir. Ketiga, mengumpulkan uang dan hadiah untuk mengelola krisis banjir. Keempat, menilai dan mengawasi proyek-proyek terkait manajemen bencana. Fungsi yang paling sering dilakukan adalah membangun koneksi dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah, menurut temuan penelitian lapangan.
11	Ade Yuliyanto, 2015	Strategi Adaptasi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana (studi kasus, Masyarakat Kampung Trangkil Baru Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Pasca	Dalam analisis Jhon W. Bennett yaitu strategi adaptasi, yang menunjukkan adanya strategi adaptasi sosial dan ekonomi masyarakat pasca bencana tsunami di Anyar Banten pada tahun 2018 sehingga membuat masyarakat mampu beradaptasi dengan kondisi dan situasi di Anyar baik sosial maupun ekonomi yang dalam setiap prosesnya

		Bencana Alam (Tanah Longsor)	
12	Diah Wulansari, Awang Darumurti, dan Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, 2017	Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Manajemen Bencana	Karyawan terlibat dalam pertumbuhan informal melalui membaca dan mempelajari buku dan literatur. Sedangkan pengembangan formal dilakukan dengan anggota staf mengambil kursus atau menerima pelatihan. Pengembangan SDM secara formal dan informal dapat membantu BPBD dalam menyelesaikan tahapan penanggulangan bencana. Tiga tahapan penanggulangan bencana, yaitu Mitigasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi, belum menjalani pelatihan. Pengembangan SDM BPBD Kabupaten Wonosobo terhambat oleh disparitas jenis organisasi, kurangnya fasilitas dan peralatan yang memadai, serta keragaman tenaga kerja. Sementara motivasi karyawan yang kuat, dukungan terhadap kebijakan pemerintah, dan partisipasi dari sektor publik dan swasta merupakan elemen pendukung.
13	<i>Juliana Sitompul, 2018</i>	Peran Petugas Kesehatan Dalam Manajemen Penanganan Bencana Alam	kebingungan, kehancuran kerugian, dan bencana adalah ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud adalah kewenangan pemerintah. Keberhasilan di lokasi bencana tergantung pada kehadiran pemimpin. Kepemimpinan dalam penanganan darurat bencana harus mampu cepat, tepat dan berani mengambil keputusan, tegas, menjalankan sistem instruksi bukan diskusi
14	Muhamad Risqi, 2020	Manajemen Komunikasi Bencana Gempa Bumi Lombok Pada Masa Tanggap Darurat Di Lombok Nusa Tenggara Barat	Masyarakat dalam merespon krisis bencana yang terjadi dengan cara koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kemudian masyarakat berkolaborasi dalam tiga perspektif koordinasi krisis yaitu Perspektif Birokrasi, Struktural dan Jaringan.
15	Pramudya, A.S dan Noor, H.J , 2018	Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelas Khusus Olahraga di Kota Yogyakarta	Ada empat lembaga yang telah memainkan peran dan tugasnya masing-masing dengan sukses tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan dan pembinaan kelas olahraga khusus. Minimnya fasilitas dan pendanaan yang memadai untuk pembinaan olahraga kelas khusus, serta prestasi akademik rata-rata siswa di kelas khusus olahraga, merupakan tantangan yang masih ada hingga saat ini.

16	Trisna.A dan Muluk M.K, 2018	Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Antara Transportasi Konvensional dan Transportasi Online (studi pada dinas perhubungan Kota Malang)	Untuk mengatasi masalah yang melibatkan transportasi di Kota Malang, pemerintah daerah memerlukan otoritas hukum yang substansial. Untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah dapat menggunakan Instrumen Kebijakan Howlett dan Ramesh untuk menyelesaikan konflik antara transportasi tradisional dan transportasi online, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Sebagai konsekuensi dari penelitian ini, Pemerintah Kota Malang telah mengadopsi PM No. 108 Tahun 2017 sebagai landasan legislatif untuk menyelesaikan sengketa antara transportasi tradisional dan transportasi online di Kota Malang, menunjukkan kecenderungan yang lebih kuat terhadap Instrumen Mandatori.
17	M. Taufik Rachman, Baiq Reinelda Tri Yunarni, 2019	Peran Dinas Pariwisata Dalam Tata Kelola dan Promosi Kawasan Pariwisata (studi kasus di kecamatan pemenang kabupaten Lombok Utara)	Kehadiran dinas pariwisata di suatu daerah tentunya akan berdampak pada perekonomian lokal dengan menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar dan tempat wisata. Mirip dengan bagaimana kehadiran Dinas Pariwisata di Distrik Juara menguntungkan lingkungan tempat ia beroperasi dengan memberi anggota pokdarwis tanah atau ruang untuk menjalankan bisnis mereka dan dengan memberi mereka uang atau pelatihan yang relevan dengan bidang pekerjaan mereka. Mengetahui berapa tenaga kerja yang dipekerjakan oleh dinas pariwisata di kecamatan pemenang akan berdampak besar pada tenaga kerja atau masyarakat. Selain itu, tugas dinas pariwisata diperlukan dalam upaya berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.
18	I Made Suardana, Ni Nyoman Yuliati, dan Randy Randy, 2018	Analisis Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Pulau Lombok	Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas dan dampak Kantor Pelayanan Pajak terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Pulau Lombok. Penelitian ini mengadopsi metodologi kuantitatif, dengan subjek penelitian berkonsentrasi pada kantor pajak pulau Lombok. Regresi berganda digunakan dalam analisis data penelitian ini. Model dan uji signifikansi yang dihasilkan menunjukkan hubungan substansial antara penerimaan pajak di tiga KPP di Pulau Lombok dengan efikasi dan tingkat kontribusi pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.
19	Nisrina .A & Khaidir. A, 2019	Peran Pemerintah Kota Padang dalam Mengembangkan Batarang Arau	Kota tua biasanya dilestarikan dan bahkan dihuni, seperti kota-kota bersejarah lainnya di kota-kota lain di negara-negara berkembang, untuk meningkatkan signifikansi sejarah dan ekonomi. Kota Tua Padang, salah satunya di

		Sebagai Destinasi Wisata kota tua	kawasan Batang Arau, memiliki makna sejarah dan arsitektur yang menyaingi kota-kota tetangga. Selain karena tempat-tempat wisata seperti sungai Batang Arau saat ini dalam kondisi banyak sampah plastik di bantaran sungai, yang membuat Batang Arau terlihat kumuh dan kotor, kondisinya saat ini kurang dimanfaatkan, bahkan bangunan bersejarah kurang dimanfaatkan dan kurang terawat. Kota Tua sekarang berfungsi sebagai tujuan wisata sejarah utama Kota Padang dan memiliki potensi untuk menarik sejumlah besar pengunjung domestik dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah, khususnya dengan menjalankan peran dalam melaksanakan perencanaan, pembangunan, kebijakan, dan peraturan pariwisata.
20	Wen Farizi zullam, Ssyarifuddi, Maya Atri Komalasari, 2020	Modal Sosial Sebagai Strategi Pemulihan Pasca Gempa di Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara	Selain menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, struktur perumahan, dan fasilitas sosial lainnya, gempa bumi juga berdampak pada kesejahteraan psikologis dan sosial ekonomi masyarakat. Kepercayaan, jaringan, dan konvensi membentuk modal sosial warga Desa Gondang. kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, agama, relawan, dan sesama warga negara. Nilai dan norma masyarakat, seperti gawe mati dan gawe hidup, serta sistem subak dan cinta, sejenis modal sosial tradisional atau adat istiadat dalam bentuk sangkep, ngibukang, dan nembakuh, adalah apa yang membangun jaringan baik dari dalam maupun luar masyarakat.
21	Maulan Ahsan	Pemulihan Pasca Gempa Bumi Melalui Metode Psikologi Support Program Untuk Menghilangkan Trauma Masyarakat Dusun Lendang Galuh Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara	Pelaksanaan program Psikososial Support Program (PSP) PMI Cabang Mataram diisi dengan berbagai kegiatan yaitu 1) Terapi Emosional, 2) Bimbingan Konsling, dan 3) Permainan dan Edukasi/Fun Game, serta yang manfaat yang dirasakan oleh membantu memulihkan kembali Psikologis para korban seperti sebelum terjadi gempa.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat penelitian yang berfokus pada penanggulangan bencana di beberapa daerah di Indonesia maupun yang spesifik membahas penanggulangan. Namun pada penelitian-penelitian yang membahas pemulihan hanya membahas aspek-aspek tertentu, kecuali pada penelitian yang ditulis oleh *Heru Kusuma Bakti dan Achmad Nurmandi dengan judul Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi Di Lombok Utara Pada Tahun 2018*, penelitian mereka memiliki cukup banyak persamaan dengan penelitian ini, hal tersebut dilihat dari persamaan pembahasan mengenai masa pemulihan terhadap gempa bumi yang terjadi di pulau Lombok, perbedaannya dapat dilihat dari aspek atau sektor dalam pemulihan bencana lalu adanya perbedaan data penelitian dimana pada penelitian ini juga memperoleh data dengan cara wawancara sehingga hasil penelitian ini diharapkan lebih mendalam, perbedaan data yang digunakan dan adanya perbedaan tahun penelitian, hal ini menjadi perbedaan karena membahas mengenai pemulihan dimana pemulihan akibat gempa merupakan hal yang berkelanjutan. Melihat penjabaran studi terdahulu di atas, dapat dipastikan skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pemulihan Gempa Bumi yang Terjadi di Kabupaten Lombok Utara” merupakan penelitian yang masih dapat dibahas karena pembahasan mengenai topik ini terus berkembang karena hingga saat ini pemulihan dari dampak gempa tersebut masih terus dilakukan.

## **1.6 Kerangka Dasar Teori**

### **1.6.1 Tata Kelola Bencana**

#### **1.6.1.1 Pengertian Bencana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bencana adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian atau penderitaan. Pengertian Bencana dapat ditemukan juga pada BAB 1 ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjelaskan Pasal 1 angka (1) yaitu:

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”

Pasal 1 angka (2) yaitu:

“Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.” Lalu Menurut (DWulansari, 2017) bencana adalah rangkaian peristiwa yang menyebabkan kerugian harta benda, penderitaan manusia, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta dapat menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut (Heryana, 2020) Kata "bencana" berasal dari kata latin dis dan astro / aster dan digunakan untuk menggambarkan bencana dalam bahasa Inggris. Aster adalah bintang, dan dis mengerikan atau tidak nyaman. Dengan demikian, bencana dapat didefinisikan sebagai "peristiwa yang disebabkan oleh konfigurasi astrologi yang tidak diinginkan" atau "untuk menjauh dari lintasan bintang" dalam arti harfiahnya, lalu menurut (Gunn, 2013) dibutuhkan upaya luar biasa dari masyarakat terdampak dan bantuan dari masyarakat internasional untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan. Bencana didefinisikan sebagai kerusakan ekologis yang meluas dari hubungan fisik dan fungsional antara manusia dan lingkungannya, yang disebabkan oleh manusia atau oleh alam, dalam bentuk peristiwa serius atau tidak terlihat (atau lambat, seperti kekeringan). Dalam beberapa penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Bencana adalah segala peristiwa yang menyebabkan kerugian dan kerusakan baik yang disebabkan oleh factor alam maupun non alam.

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada bencana alam berupa gempa bumi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bencana alam sebagai bencana yang disebabkan oleh alam, termasuk gempa bumi, angin kencang, dan banjir. Pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 1 angka (2) dijelaskan bahwa bencana alam adalah, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,

kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam dijelaskan dalam buku "Manajemen Manajemen Bencana" sebagai hasil dari pertemuan kedua fenomena fisik, seperti gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung berapi, dan aktivitas manusia (Khambali, 2017).

#### **1.6.1.2 Manajemen bencana**

Melihat latar belakang pada penelitian ini, bencana di Indonesia tidak dapat dihindari, oleh karena itu diperlukannya manajemen bencana agar dapat mengurangi dampak yang disebabkan oleh bencana. Dalam modul penanggulangan bencana dijelaskan bahwa manajemen bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penanganan bencana (Arsyad M. , 2017). Lalu menurut universitas of Wisconsin manajemen Bencana adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk menjaga hal-hal di bawah kendali selama bencana dan keadaan darurat bencana sehingga kerangka kerja dapat dibangun untuk membantu masyarakat yang rentan dalam meminimalisir dampak bencana. Penanggulangan bencana didefinisikan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 sebagai proses yang dinamis, berkelanjutan, dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas tindakan yang terkait dengan pengamatan dan analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, manajemen darurat, rehabilitasi, dan pembangunan kembali bencana. Melihat pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, manajemen bencana adalah proses pengaturan tentang penanganan bencana baik sebelum, saat, maupun setelah terjadinya bencana yang bertujuan untuk mengurangi dampaknya.

Manajemen bencana dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra Bencana yang dimana pencegahan difokuskan pada kesiapsiagaan level medium, lalu tahap saat tanggap darurat seperti kegiatan bantuan darurat dan pengungsian, dan yang terakhir adalah tahap pasca bencana yaitu kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi (NINGSIH, 2022). Dalam setiap tahapan tersebut terdapat masing-masing tindakan dimana pada prabencana kegiatan yang dilakukan adalah pencegahan, mitigasi, dan

kesiapsiagaan, lalu pada tahap saat terjadinya bencana tindakan yang dilakukan adalah tanggap darurat, dan tahap yang terakhir yaitu setelah terjadinya bencana (pascabencana) adalah rehabilitasi dan rekonstruksi (Adiyoso W. , 2018). Berikut penjelasan terkait tindakan dalam manajemen bencana:

#### 1. Pencegahan dan Mitigasi.

Menurunkan risiko bencana, pencegahan dan mitigasi bencana harus selalu dilakukan. Namun, bahkan ketika tidak ada kemungkinan bencana, kegiatan ini harus dilakukan untuk menurunkan risiko jika salah satu terjadi. Pencegahan dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan “mengobati” bahaya tertentu sedemikian rupa yang bertujuan untuk meminimalisir dampak bencana, sedangkan mitigasi lebih memfokuskan pada upaya penyusunan berbagai kebijakan dan strategi (Adiyoso W. , 2018). Kegiatan yang dilakukan pada bagian ini adalah, perencanaan, pencegahan, pendidikan, penelitian, penataan tata ruang (sukma, 2010).

#### 2. Kesiapsiagaan.

Ketika kemungkinan bencana melibatkan masyarakat yang dapat terkena dampak atau masyarakat yang dapat membantu melaksanakan upaya untuk mengurangi dampak negatif bencana, persiapan adalah salah satu metode manajemen bencana yang digunakan dalam tahap pra-bencana. (Adiyoso W. , 2018). Dalam UU No. 24 Tahun 2007, lebih lanjut dijelaskan bahwa persiapan adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk meramalkan bencana melalui perencanaan dan dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan efisien. Setelah mempertimbangkan informasi yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa persiapan adalah serangkaian upaya masyarakat luas yang dilakukan sebelum bencana yang dirancang untuk mengurangi dampaknya.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan antara lain, (a) *early warning system*, (b) penilaian kerentanan bencana, (c) pengembangan kapasitas, (d) penimbunan barang dalam menanggapi bencana yang akan terjadi (Nasions, 2008). Dalam web BPBD NTB juga

dijelaskan, secara umum kegiatan dalam kesiapsiagaan yaitu, (i) Menyusun rencana, menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi, melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan tersebut sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditunjukan untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat terjadi bencana.

### 3. Tanggap Darurat

Tanggap darurat adalah tindakan yang segera diambil pada saat terjadinya bencana yang diarahkan untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh bencana nyawa dan harta benda (Adiyoso W. , 2018). Berdasarkan Perka BNPB NO.10 Tahun 2008 tentang komando tanggap darurat, dijelaskan tanggap darurat bencana adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana demi menangani dampak negatif yang meliputi kegiatan penyelamatan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan sarana-prasarana yang terdampak.

Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat tanggap darurat, yang pertama adalah (a) peringatan dini atau memberikan tanda atau isyarat pada masyarakat, lalu yang kedua adalah (b) penyelamatan dan pencarian, kegiatan ini meliputi pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak hingga penyeleksian masyarakat yang terdampak bencana, dan yang ketiga adalah (c) pengungsian, yaitu kegiatan pemindahan penduduk ke tempat evakuasi yang lebih aman dan terlindungi dari resiko dan ancaman bencana (Adiyoso W. , 2018).

### 4. Pemulihan (*recovery*)

Recovery merupakan strategi penanggulangan bencana yang berfokus pada elemen-elemen yang dapat memperbaiki keadaan masyarakat dan lingkungan terdampak bencana dengan membuka kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh (Arsyad M. , 2017). Pemulihan, pada dasarnya, adalah upaya untuk membuat segalanya menjadi lebih

baik setelah musibah (Adiyoso W. , 2018). Studi ini mencakup bagian tertentu tentang pemulihan lanjutan.

### **1.6.2 Manajemen Pemulihan**

Melihat latar belakang penelitian dan perumusan masalah, orang dapat melihat bahwa manajemen pemulihan adalah topik yang dibahas secara lebih rinci. Recovery adalah strategi penanggulangan bencana yang berfokus pada elemen-elemen yang dapat memperbaiki keadaan masyarakat dan lingkungan terdampak bencana dengan membuka kembali kelembagaan, prasarana, dan fasilitas secara terencana, terkoordinasi, terintegrasi, dan menyeluruh. (Arsyad M. , 2017). Dalam upaya pemulihan setelah terjadinya bencana Ningsih (2022) menjelaskan bahwa terdapat dua tahapan mengenai manajemen Pemulihan, yang pertama yaitu Rehabilitasi, Rehabilitasi adalah proses perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan baik pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai di dalam suatu wilayah pasca bencana dan yang mejadi sasaran utamanya yaitu untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Lalu rekrontuksi merupakan pembangunan kembali sarana- prasarana dan tatanan pada daerah yang terdampak termasuk pemerintahan maupun masyarakat dengan target bertumbuh dan berkembangnya kegiatan di wilayah yang terdampak (NINGSIH, 2022).

#### **1.6.2.1 Tujuan Pemulihan**

Manajemen pasca bencana berusaha untuk mengurangi rasa sakit korban, mengembalikan situasi seperti sebelum bencana, atau setidaknya membuatnya lebih baik, menciptakan lingkungan yang aman, dan dapat mengurangi ancaman bencana di masa depan (IDEP, 2007). Lalu menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pemulihan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat

bencana agar kembali seperti semula dan pemulihan ini tidak berfokus pada lingkungan fisik tetapi pemulihan juga dilakukan kepada korban baik yang terdampak secara fisik maupun mental. Melihat penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pemulihan memiliki tujuan untuk membangun kembali segala aspek yang terdampak dengan tujuan lebih baik dari sebelum terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam.

#### **1.6.2.2 Aspek Penting Pemulihan**

Dalam manajemen pemulihan terdapat beberapa ruang lingkup aspek penting. Dalam penelitiannya yang berjudul Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi di Pulau Lombok, Kusuma dan Nurmandi menyebutkan bahwa terdapat lima (5) aspek penting dalam pemulihan yaitu sektor pemukiman, sektor ekonomi, sektor sosial, dan lintas sektor (Kusuma & Nurmandi, 2020). Lalu adapula aspek-aspek penting yang dijelaskan pada buku Manajemen Bencana, (Adiyoso W. , 2018) :

- a. Aspek Kemanusiaan, ini memerlukan partisipasi dari lembaga, organisasi masyarakat, dunia bisnis, dan masyarakat serta layanan psikologis, kesehatan, dan pendidikan sosial, resolusi konflik dan rekonsiliasi, keamanan, dan ketertiban.
- b. Aspek perumahan dan permukiman, komponen ini mencakup pemulihan lingkungan alam di daerah bencana, membantu memperbaiki tempat tinggal komunal, dan membangun fasilitas sosial baru.
- c. Aspek infrastruktur pembangunan, termasuk meningkatkan sarana dan prasarana umum, melanjutkan operasi pemerintah dan layanan publik, membangun kembali bangunan dan infrastruktur, menerapkan desain bangunan tahan bencana yang tepat, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan layanan masyarakat yang vital.
- d. Aspek ekonomi, aspek ini meliputi pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; dan promosi pertumbuhan ekonomi lokal di sektor-sektor termasuk perbankan, perdagangan, dan industri.

- e. Aspek sosial, ini termasuk membangun struktur sosial dan budaya, memulihkan adat istiadat dan pengetahuan lokal, memperbaiki hubungan antar budaya dan agama, dan merevitalisasi kehidupan sosial-budaya lingkungan.
- f. Aspek lintas sektor, elemen ini merupakan puncak dari berbagai tindakan, termasuk yang terkait dengan tata kelola dan lingkungan

Selain itu pada Modul manajemen penanggulangan bencana yang ditulis oleh Arsyad dijelaskan aspek pengukur yang diperlukan dalam manajemen pemulihan (Arsyad M. , 2017) :

- a. Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana, Perbaikan lingkungan fisik meliputi kegiatan: perbaikan lingkungan fisik untuk kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan usaha dan kawasan gedung. Indikator yang harus dicapai pada perbaikan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem.
- b. Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum, prasarana dan sarana umum adalah jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Prasarana umum atau jaringan infrastruktur fisik disini mencakup : jaringan jalan/ perhubungan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan sanitasi dan limbah, dan jaringan irigasi/ pertanian. Sarana umum atau fasilitas sosial dan umum mencakup: fasilitas kesehatan, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran pemerintah, dan fasilitas peribadatan.
- c. Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat, yang menjadi target pemberian bantuan adalah masyarakat korban bencana yang rumah atau lingkungannya mengalami kerusakan struktural hingga tingkat sedang akibat bencana, dan masyarakat korban berkehendak untuk tetap tinggal di tempat semula. Kerusakan tingkat sedang adalah kerusakan fisik bangunan sebagaimana Pedoman Teknis (Kementerian PU, 2006) sehingga mengganggu penyelenggaraan fungsi huniannya. Untuk bangunan rumah rusak berat atau roboh diarahkan untuk rekonstruksi.

- Tidak termasuk sasaran pemberian bantuan rehabilitasi adalah rumah/ lingkungan dalam kategori: a. Pembangunan kembali (masuk dalam rekonstruksi) b. Pemukiman kembali (resettlement dan relokasi) c. Transmigrasi keluar daerah bencana
- d. Pemulihan Sosial Psikologis, pemulihan sosial psikologis adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi kembali secara normal. Sedangkan kegiatan psikososial adalah kegiatan mengaktifkan elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang sudah terlatih. Pemulihan sosial psikologis bertujuan agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadi bencana, serta tercegah dari mengalami dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental.
  - e. Pelayanan Kesehatan Pemulihan, pelayanan kesehatan adalah aktivitas memulihkan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga minimal tercapai kondisi seperti sebelum terjadi bencana. Pemulihan sistem pelayanan kesehatan adalah semua usaha yang dilakukan untuk memulihkan kembali fungsi sistem pelayanan kesehatan yang meliputi: SDM Kesehatan, sarana/prasarana kesehatan, kepercayaan masyarakat.
  - f. Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik Kegiatan rekonsiliasi adalah merukunkan atau mendamaikan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran dan konflik. Sedangkan kegiatan resolusi adalah memposisikan perbedaan pendapat, perselisihan, pertengkaran atau konflik dan menyelesaikan masalah atas perselisihan, pertengkaran atau konflik tersebut. Rekonsiliasi dan resolusi ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah bencana untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
  - g. Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya Pemulihan sosial ekonomi budaya adalah upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan dan/atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana. Kegiatan

pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk menghidupkan kembali kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana seperti sebelum terjadi bencana.

- h. Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pemulihan keamanan adalah kegiatan mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana sebelum terjadi bencana dan menghilangkan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah bencana.

### **1.6.2.3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi.**

Seerti yang telah dijelaskan sebelumnya, Dalam bagian tahap pemulihan bencana, terbagi menjadi dua bagian yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi, dalam buku manajemen bencana dijelaskan dimana rehabilitasi mengarah pada pemulihan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk difungsikan kembali, sedangkan rekonstruksi berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana yang rusak berat (Adiyoso W. , 2018). Melihat penjelasan di atas dapat dilihat perbedaannya dimana, rehabilitasi lebih berfokus pada perbaikan sedangkan rekonstruksi berfokus pada pembangunan kembali. Berikut penjelasan mengenai penyelenggaraan yang akan berfungsi sebagai parameter pada penelitian ini. berdasarkan buku Manajemen Bencana yang ditulis oleh Wignyo Adiyoso (2018) :

#### **a. Rehabilitasi**

Rehabilitasi mempunyai beberapa sasaran yang diutamakan dalam pelaksanaannya, yang pertama adalah kelompok manusia dan seluruh aspek kehidupan serta penghidupan yang terdampak bencana, lalu yang kedua adalah sumber daya buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana sehingga nilai guna dan fungsinya berkurang, dan yang ketiga adalah mengembalikan fungsi ekologis atau lingkungan alam yang rusak akibat bencana. Dalam penyelenggaraannya rehabilitasi terdiri dari beberapa kegiatan berikut:

1. Perbaikan lingkungan daerah bencana.

Perbaikan lingkungan berupa kegiatan dalam bentuk perbaikan atau pemeliharaan kondisi fisik dan lingkungan menjadikan kawasan memenuhi persyaratan sosial, teknis, ekonomi, dan budaya. Kawasan perumahan, kawasan industri, lokasi bisnis, dan lokasi konstruksi semuanya mendapat manfaat dari kegiatan perbaikan fisik.

## 2. Perbaikan prasarana dan sarana umum

Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana merupakan perbaikan infrastruktur, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana untuk memenuhi persyaratan kebutuhan kemanusiaan yang meliputi (a) persyaratan keselamatan, (b) persyaratan sistem sanitasi, (c) persyaratan penggunaan bahan bangunan, (d) persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung, dan bangunan air.

## 3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat

Program ini merupakan inisiatif pemerintah yang memungkinkan masyarakat untuk memulihkan rumah mereka yang rusak akibat bencana sehingga dapat ditempati. Bantuan yang dapat diberikan oleh pemerintah antara lain bahan material, komponen rumah, atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evakuasi tingkat kerusakan rumah. Mekanisme pelaksanaan bentuk bantuan ini ditetapkan oleh BPBD setempat dengan menyesuaikan pola pemberdayaan masyarakat.

## 4. Pemulihan sosial psikologis

Pemulihan psikologis terhadap korban bencana merupakan kegiatan yang perlu dilakukan karena berpengaruh terhadap kelanjutan kehidupan korban bencana. Pada umumnya, kondisi psikologis sebagian korban bencana memburuk setelah terjadinya bencana. Pemburukan psikologis ini bisa berupa trauma atau tekanan-tekanan lain akibat kehilangan harta benda ataupun sanak saudara. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah psikologis antara lain (a) bantuan konseling dan konsultasi, (b)

pendampingan, (c) pelatihan, dan (d) kegiatan psikososial. Pemerintah atau para relawan dapat menyediakan ahli psikologi khusus untuk mendampingi korban bencana sehingga kegiatan-kegiatan untuk memulihkan kondisi psikologis para korban dapat terselenggara dengan baik.

#### 5. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan setelah terjadinya bencana dilakukan untuk memastikan kondisi korban bencana segera pulih. Pemulihan kondisi masyarakat terkena dampak bencana antara lain (a) memberikan perawatan lanjutan bagi korban bencana yang sakit dan mengalami luka, (b) menyelenggarakan balai pengobatan untuk memudahkan para korban bencana menerima pemeriksaan, (g) menyediakan obat-obatan, (d) menyediakan peralatan kesehatan, (e) menyediakan tenaga medis dan paramedis, serta (f) mengembalikan fungsi sistem pelayanan kesehatan.

#### 6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik

Rekonsiliasi adalah layanan yang diberikan kepada korban bencana untuk membantu mereka menghindari keadaan yang tidak menguntungkan atau masalah sosial yang mungkin timbul setelah bencana. Kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan rekonsiliasi bertujuan untuk meningkatkan hubungan masyarakat dan menghentikan ketegangan sosial dan perselisihan memburuk. Hal ini dimungkinkan untuk melakukan upaya, terutama melalui mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat yang relevan dengan tetap memperhatikan keadaan, situasi, dan sifat serta budaya masyarakat setempat.

#### 7. Pemulihan sosial, budaya, dan ekonomi.

Pemulihan secara sosial, budaya, dan ekonomi dilakukan untuk menolong masyarakat yang terdampak bencana demi mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya bencana. Beberapa strategi kegiatan yang dapat dilakukan antara lain,

membentuk layanan advokasi dan konseling, bantuan stimulan aktivitas, dan pelatihan.

#### 8. Pemulihan keamanan dan ketertiban

Selain pemulihan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada pascabencana diperlukan juga pemulihan keamanan dan ketertiban. Hal yang dapat dilakukan memulihkan antara lain, Pengaktifan fungsi badan keamanan dan ketertiban di daerah yang terdampak, meningkatkan kontribusi masyarakat dalam kegiatan keamanan dan ketertiban, serta pengkoordinasian badan yang bertanggung jawab.

#### 9. Pemulihan fungsi pemerintahan

Pemulihan fungsi pemerintah merupakan salah satu upaya yang diutamakan. Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan ini dapat dilakukan dengan beberapa strategi antara lain (a) mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan dengan segera, (b) penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintah, (c) konsolidasi para petugas pemerintahan, (d) pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintah, serta (e) pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.

#### 10. Pemulihan fungsi pelayanan public

Tujuan pemulihan fungsi pelayanan publik adalah untuk memungkinkan masyarakat menerima layanan seperti yang mereka lakukan sebelum tragedi tersebut. Ada sejumlah cara untuk melakukan kegiatan untuk memulihkan operasi layanan publik antara lain (a) rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik, (b) mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait, (c) pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

### b. Rekonstruksi

Selain dapat mengurangi kerentanan terhadap bencana, rehabilitasi pascabencana yang efektif harus mengarah pada pemulihan keadaan masyarakat di semua lini secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Tujuan pertama dari proses rekonstruksi adalah meningkatkan kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi, kemudian meningkatkan ketertiban dan menegakkan hukum, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek kehidupan bagi daerah pasca bencana, memungkinkannya untuk beradaptasi dengan keadaan dan situasi baru setelah bencana.

Dalam kegiatan rekonstruksi, rekontruksi fisik adalah tindakan rekonstruksi untuk memperbaiki kondisi fisik, baik secara fisik maupun non-fisik. Berikut adalah bagaimana rekonstruksi fisik berlangsung:

1. Perbaikan sarana dan prasarana

Kegiatannya meliputi perbaikan infrastruktur, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Proses perbaikan infrastruktur dan sarana dilakukan dengan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan tata ruang wilayah pasca bencana, yang meliputi (a) rencana struktur ruang wilayah, (b) rencana pola ruang wilayah, (c) penetapan kawasan, (d) arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan (e) arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Perbaikan Sarana Sosial Masyarakat

Pembangunan atau renovasi sekolah, fasilitas kesehatan, panti asuhan, tempat ibadah, panti jompo, dan balai desa adalah contoh peningkatan fasilitas sosial bagi masyarakat. Pengembangan fasilitas sosial dalam masyarakat harus mematuhi persyaratan teknis berikut (i) standar teknik konstruksi bangunan, (ii) penetapan Jokasi, dan (iii) arahan pemanfaatan ruang.

3. Penerapan Rancang Bangun dan Penggunaan Peralatan yang Lebih Baik dan Tahan Bencana

penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan oleh institusi terkait di bawah koordinasi dengan BNPB atau BPBD di tingkat daerah dengan (a) menekankan peraturan bangunan (*building code*),

peraturan perencanaan (*design code*), serta pedoman dan manual rancang bangun yang ada, (b) mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan, (c) menyesuaikan dengan tata ruang, (d) memerhatikan kondisi dan kerusakan daerah, (e) memerhatikan kearifan lokal, dan (f) menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana di daerah yang bersangkutan.

Rekonstruksi nonfisik adalah bentuk lain dari rekonstruksi. Rekonstruksi nonfisik adalah peningkatan atau pemulihan layanan publik, sosial, ekonomi, dan kegiatan kehidupan masyarakat di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, layanan yang disediakan oleh kantor-kantor pemerintah, tempat ibadah, dan kondisi mental / sosial mereka yang terkena bencana. Cakupan kegiatan rekonstruksi nonfisik sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemulihan Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat.

Kegiatan pemulihan kehidupan sosial dan budaya masyarakat dilakukan dengan (a) menciptakan suasana yang kondusif serta menghilangkan trauma terhadap bencana demi perkembangan kegiatan sosial dan bermasyarakat, (b) membantu dan memberikan fasilitas kegiatan sosial budaya, (c) penyesuaian kehidupan bermasyarakat dengan lingkungan yang rawan bencana, dan (d) meningkatkan kesiapan masyarakat dengan kampanye sadar benacan dan peduli bencana.

2. Partisipasi dan Peran Serta Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, dan Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan potensi-potensi yang ada di masyarakat, badan kemasyarakatan, dan dunia usaha, demi kelancaran penyelenggaraan pemulihan bencana. Partisipasi dapat dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi potensi yang ada serta membangun kerangka kerja kemitraan yang jelas dengan elemen-elemen tersebut. Selain itu, dilakukan juga fasilitasi bagi peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

3. Kegiatan Pemulihan Kegiatan Perekonomian Masyarakat

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi badan penanggulangan bencana bersama-sama dengan masyarakat dengan (a) pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana, (b) pemberdayaan kelompok usaha bersama dalam bentuk bantuan dan/atau barang, (c) melibatkan kelompok-kelompok usaha dan unit-unit usaha lokal sebanyak-banyaknya dalam kegiatan rekonstruksi fisik dan nonfisik, (d) mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif, (e) Memerhatikan dan memfasilitasi kelompok-kelompok sosial yang rentan untuk meningkatkan kemampuan mereka, serta (f) mendorong dan memfasilitasi kegiatan budaya yang ada agar puli kembali dan dapat beraktivitas seperti semula, sekaligus memanfaatkan pendekatan budaya untuk kegiatan sadar bencana.

#### 4. Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik dan Pelayanan Utama dalam Masyarakat

Salah satu aspek yang perlu segera dipulihkan pascabencana adalah pelayanan publik. Pemulihan fungsi pelayanan publik dilaksanakan melalui upaya (a) rehabilitasi dan pemulihan prasarana dan sarana pelayanan publik, (b) mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait, serta (c) pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

#### 5. Pemulihan Kesehatan Masyarakat

Pemulihan yang dilakukan lainnya adalah kesehatan masyarakat. Meskipun dalam fase tanggap darurat telah dilakukan pertolongan dan pengobatan kepada para korban, namun dalam jangka panjang perlu dilakukan pengecekan dan pemantauan kesehatan masyarakat. Pemulihan kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan (a) pengadaan posko/balai kesehatan di lingkungan para korban bencana, (b) memantau kondisi dan memberikan perawatan lanjutan bagi korban bencana yang sakit dan mengalami luka, (c) menyediakan obat-obatan, peralatan kesehatan, serta tenaga medis dan paramedis, (d) menyediakan layanan

konsultasi dan terapi untuk memulihkan kembali kondisi psikologis korban.

### **1.6.3 Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.**

Pemerintah dalam arti luas mencakup legislatif, yudikatif, dan cabang pemerintahan lainnya. Sementara pemerintah dapat dipandang sebagai pemangku kepentingan, pelaksana kekuasaan eksekutif, atau bahkan lebih sempit, sebagai koordinator administrasi negara (Abdullah, 2016). Secara umum, pemerintah adalah badan, lembaga, atau organisasi yang memiliki kewenangan untuk memberlakukan dan menegakkan hukum, termasuk undang-undang di bidang tertentu (NURDIN, 2017). Bencana alam jelas menimbulkan ancaman bagi keselamatan populasi yang lebih besar, maka keterlibatan negara diperlukan untuk manajemen bencana. Pemerintah harus berpartisipasi aktif dalam strategi penanggulangan bencana (Heryati, 2020). Karena itu, pemerintah perlu memiliki kapasitas yang cukup besar untuk mengelola situasi di daerah rawan bencana. Perencanaan dan persiapan untuk tanggap bencana, dukungan koordinasi, pedoman rekonstruksi, dan masalah kependudukan adalah beberapa bakat ini. Dengan program penanggulangan bencana yang dikembangkan, pemerintah dapat bekerja sama dengan sukses (Suryadi, 2020). Manajemen bencana digambarkan sebagai proses berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, bisnis, dan masyarakat untuk merencanakan dan mengurangi dampak bencana, mengambil keputusan setelah bencana, dan mengambil tindakan untuk pemulihan dalam buku *Disaster Management* di Negara Rawan Bencana. (Susanto, 2006). Lalu dalam buku *collaborative leadership* yang ditulis oleh David Chrislip mengatakan bahwa ketika pembuatan rencana melibatkan pemegang kekuasaan, prosesnya akan lebih konstruktif lalu pertimbangan yang dihasilkan lebih tepat, dan pemimpin yang baik di dalam komunitas akan membantu kegiatan tersebut berjalan (Chrislip, 2002). Dalam

menangani dampak bencana tentunya memerlukan keterlibatan dari segala pihak (FEMA, 2005). Melihat penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan penanggung jawab dalam menangani bencana alam.

Lalu dalam masal pemulihan sendiri, Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan rekontruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana. Dalam buku manajemen bencana yang ditulis oleh Wignyo Adiyoso juga mengatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 (Adiyoso W. , 2018). Untuk mempersiapkan korban tambahan, perlu untuk mencari jaminan bahwa hak-hak orang dan pengungsi yang terkena dampak bencana akan ditegakkan secara setara dan sesuai dengan standar layanan. Korban bencana harus dijamin pemulihan dari dampak bencana, alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang sesuai dan dapat digunakan, serta pengeluaran untuk rekonstruksi dan rehabilitasi (Suryadi, 2020).

#### **1.6.4 Lembaga Penanggulangan Bencana.**

Dalam menanggulangi bencana alam di Indonesia berdasarkan UU No.24 Tahun 2007, pelaksanaannya di koordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan ditingkat daerah di koordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

##### **1.6.4.1 Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB)**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah suatu badan Pemerintah Nonkementerian yang bertugas membantu Presiden untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana dan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Melihat kondisi Indonesia dimana

keadaan geografis, hidrologis, demografis, dan geologis yang memungkinkan banyak terjadinya bencana alam mendorong pemerintah Indonesia untuk membangun sistem penanggulangan bencana. melihat keadaan tersebut lalu dibuatlah fungsi dan tugas BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Dalam web resminya dijelaskan bahwa fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah membuat kebijakan mengenai penanggulangan bencana termasuk dalam menangani pengungsi dengan bertindak cepat, efektif dan efisien. Lalu fungsi lainnya yaitu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, menyeluruh, dan terpadu. Adapula tugas BNPB yaitu:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terkait penanggulangan bencana yang mencakup segala tindakan penanggulangan adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan keberlangsungan kegiatan penanggulangan bencana yang didasari peraturan perundang-undangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden disetiap bulannya dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Bertanggung jawab dan menggunakan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. Membentuk pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

#### **1.6.4.2 Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

Menurut pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD), sebuah organisasi pemerintah non-departemen, mengelola bencana di provinsi, kabupaten, dan kota. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didukung oleh peraturan dari Menteri Dalam Negeri dan Sosial, diikuti dengan peraturan BNPB dan peraturan daerah dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengikuti hukum saat melaksanakan kewajibannya.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Heryati (2020), secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki fungsi dan tugas dalam pemulihan yaitu, (a) merumuskan kebijakan teknis, penetapan, pedoman dan pengarahannya serta standarisasi penyelenggaraan yang adil dan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), (b) mengkoordinasikan pelaksanaan pemulihan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, (c) merumuskan, perencanaan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian teknis laporan pemulihan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

## **1.7. Definisi Konseptual**

### **1.7.1 Tata kelola Manajemen Bencana.**

Manajemen bencana adalah proses pengaturan tentang penanganan bencana baik sebelum, saat, maupun setelah terjadinya bencana yang bertujuan untuk mengurangi dampaknya. Manajemen bencana terdiri dari tiga tahap yaitu prabencana atau sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, dan Pascabencana atau setelah terjadinya bencana.

### **1.7.2 Manajemen Pemulihan**

Pemulihan adalah usaha penanggulangan bencana pada tahap pascabencana dengan menekankan pada faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terdampak oleh bencana dengan mengfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana secara terencana,

terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. Dalam pemulihan sendiri terdapat dua bagian, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.

### 1.7.3 Pemerintah Dalam Pemulihan Bencana

Untuk mencegah korban lebih lanjut, adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak orang dan pengungsi yang terkena dampak bencana secara adil dan sesuai dengan standar layanan. Korban bencana harus dijamin pemulihan dari dampak bencana, alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang sesuai dan dapat digunakan, serta pengeluaran untuk rekonstruksi dan rehabilitasi.

### 1.7.4 Lembaga Penanggulangan Bencana

Dalam menanggulangi bencana alam di Indonesia berdasarkan UU No.24 Tahun 2007, pelaksanaannya di koordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan ditingkat daerah di koordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

## 1.8 Devinisi Operasional

Untuk melihat bagaimana peran pemerintah pada pemulihan terhadap Gempa Bumi yang terjadi di wilayah Lombok utara, maka penelitian ini menggunakan beberapa aspek penting yang nantinya digunakan sebagai dasar-dasar untuk menetapkan Variabel, Indikator, dan Parameter dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Wignyo Adiyoso (2018), antara lain:

Tabel 1.3 Adaptasi Tabel Wignyo Adiyoso

Variabel	Indikator	Parameter
Aspek kemanusiaan	Kesehatan psikologis	Menyediakan bantuan konseling dan konsultasi berupa pendampingan, pelatihan, dan kegiatan psikososial di Kabupaten Lombok Utara demi mengembalikan trauma akibat dampak gempa yang terjadi.
	Kesehatan fisik	Memberikan perawatan berkelanjutan seperti pemantauan kondisi masyarakat yang terdampak, lalu penyediaan obat-obatan, dan peralatan terhadap masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang terdampak.

	Pendidikan	Mengembalikan dan meningkatkan sistem belajar mengajar yang menekankan pada pemulihan akibat gempa.
Aspek perumahan	Perbaikan dan pembangunan rumah masyarakat	Memberi bantuan sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki dampak dari kerusakan baik berupa bahan material, komponen rumah, maupun dana bagi Masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang terdampak.
Aspek infrastruktur pembangunan	prasarana dan sarana umum	Perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana di Kabupaten Lombok Utara dengan menerapkan rancangan yang tahan bencana. Prasarana umum atau jaringan infrastruktur fisik disini mencakup: jaringan jalan/ perhubungan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan sanitasi dan limbah, dan jaringan irigasi/pertanian. Sarana umum atau fasilitas sosial dan umum mencakup: fasilitas kesehatan, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran pemerintah, dan fasilitas peribadatan.
Aspek ekonomi	Pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal	Mengembalikan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Lombok Utara baik dengan cara pemberdayaan dan memfasilitasi masyarakat dan UMKM
Aspek sosial	konstruksi sosial dan budaya	Hilangnya rasa traumatik masyarakat Lombok Utara terhadap gempa dan menciptakan suasana yang kondusif demi perkembangan kegiatan sosial budaya masyarakat Lombok Utara
	Rekonsiliasi dan resolusi konflik	Menurunnya konflik sosial dan ketegangan di masyarakat Lombok Utara yang terjadi saat terdampak gempa dengan cara mediasi yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang terkait
Aspek lintas sektor	Pemulihan aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan.	Pulihnya fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Utara lalu memperbaiki sistem pemerintahan maupun layanan publik yang lebih efisien saat terjadinya bencana.

(Sumber: Wignyo Adiyoso, 2018)

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1. Jenis Penelitian.

Dengan melihat rumusan masalah di atas, penelitian ini lebih tepat menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena metode ini dapat

membantu peneliti menemukan informasi yang lebih dekat dengan objek yang ingin diteliti karena penelitian kualitatif bersifat elaboratif. Lalu melihat variable penelitian yang beragam, dengan penelitian kualitatif dapat memudahkan peneliti menemukan hasil dan kesimpulan pada penelitian ini. Dengan digunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif ini diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil yang mendalam dan dapat menjawab bagaimana peran pemerintah dalam pemulihan Gempa Bumi yang terjadi di Pulau Lombok pada tahun 2018.

Penelitian kualitatif sendiri merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Sugiyono, 2013, p. 7), pedoman untuk wawancara berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian ini. Setelah proses pengumpulan data, data dari informan terpilih diolah melalui tahapan klasifikasi dan reduksi data, pengolahan data, analisis data, serta perumusan temuan dan kesimpulan kajian. Menurut Raco, J (2018) ketika melakukan penelitian kualitatif, pertanyaan umum yang sangat luas yang akan dipersempit digunakan untuk mengumpulkan informasi dari peserta penelitian atau peserta dalam bentuk kata-kata atau tulisan.

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Lombok Utara yang diawali dari Badan Penanggulangan Bencana Nusa Tenggara Barat (BPBD NTB), lalu di Kabupaten Lombok Utara, dan Desa Tanjung. Hal ini ditunjukkan untuk melihat bagaimana pemerintah dalam masa pemulihan pasca Gempa Bumi yang terjadi.

### **1.9.3 Unit Analisa Data**

Unit analisis data pada penelitian ini diambil berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu pegawai bagian analisis bencana BPBD NTB, Masyarakat pegiat UMKM dan pariwisata di KLU, Direktur perusahaan swasta, masyarakat Desa Tanjung, Kepala Desa Tanjung.

#### 1.9.4 Jenis Data Penelitian

Data primer, adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan (Supindo, A. 2017). Dalam penelitian ini data primer yang ditetapkan berdasarkan pada definisi operasional yang diperoleh dari objek penelitian dengan cara wawancara demi mengumpulkan hasil dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 1.4 Jenis Data Penelitian

NO	Data Premier	Sumber Data	Teknik Pengumpulan
1	Pemulihan Di Lombok Utara	Mustakim, ST.MT (Analisis bencana BPBD NTB)	Wawancara
2	Perkembangan Pemulihan di Desa Tanjung	Budiawan, SH (Kepala Desa, Desa Tanjung)	Wawancara
3	Bantuan Dari Swasta	Hari Patmono, ST (Direktur Perusahaan Swasta)	Wawancara
4	Keberlangsungan kegiatan ekonomi di saat pemulihan	1. Mus (UMKM Pariwisata) 2. Hendra (UMKM pariwisata)	Wawancara

Data sekunder, adalah data yang didapat berdasarkan penelitian atau sumber-sumber yang telah ada dalam bentuk dokumen penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui internet maupun secara langsung dalam bentuk, jurnal, buku-buku dan arsip-arsip yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

No	Data Sekunder	Sumber Data	Teknik Penumpulan Data
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2020, Kab Lombok Utara	Pemerintah Kab Lombok Utara	Studi Pustaka
2	Laporan pemulihan Rumah Tahan Gempa	BPBD NTB dan LAKIP Dinas PUPR 2022	Studi Pustaka

3	Laporan Data kerusakan dan Kerugian akibat Gempa	BPBD NTB	Studi Pustaka
4	Laporan Pemulihan	BPBD NTB	Studi Pustaka

### 1.9.5 Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan kualitas penganalisaan dan berhasil atau tidaknya penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini bersifat Snowball yang dapat berkembang saat pengambilan datanya demi mengumpulkan hasil data yang tepat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara

Pada penelitian ini mewawancarai penganalisis bencana BPBD NTB untuk mengetahui bagaimana dampak dari gempa, kemudian mengetahui perkembangan pemulihan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan bagaimana cara pemerintah mengatasinya beserta hambatannya. Lalu mewawancarai Direktur perusahaan yang membantu proses pemulihan, lalu dua orang masyarakat dari KLU yang terdampak, dan yang terakhir adalah kepala Desa Tanjung untuk melihat perkembangan pemulihan dan melihat pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pemulihan. Untuk menghindari hilangnya informasi atau kelupaan informasi, peneliti meminta izin kepada narasumber untuk menggunakan alat dokumentasi yang berupa alat perekam dan kamera.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelusuran data-data dalam bentuk dokumen maupun bacaan. Pada penelitian ini dokumentasi diperlukan untuk menunjang hasil

data primer penelitian demi menentukan hasil penelitian yang relevan, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **1.9.6 Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang prosesnya dilaksanakan sejak dimulainya pengumpulan data penelitian hingga kesimpulan. Teknik analisa data pada penelitian ini diawali dengan (1) pengumpulan data baik data primer maupun sekunder, yang lalu akan dilanjutkan dengan (2) menggolongkan data atau pengelompokan data-data primer maupun sekunder yang diperoleh baik mana yang diperlukan dan tidak diperlukan demi menemukan hasil data yang jelas sesuai kebutuhan penelitian. (3) Setelah data-data tersebut dikelompokkan, lalu data tersebut di analisa demi menemukan hasil penelitian yang objektif dan dapat menjawab bagaimana peran pemerintah dalam pemulihan terhadap gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara. Tahap-tahap ini perlu dilakukan demi mendapatkan hasil penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini dan memudahkan peneliti pada saat mencari kesimpulan.

